



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2016 - 2021**

EDISI REVISI



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 182 Telp (0742) 21192 Fax. 322620

KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG

NOMOR /ADP/2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah perlu disusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam poin a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - b. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021.
- i. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021;
 Kedua : Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun;

Ketiga : Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal
Pada tanggal : Februari 2017

Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang

Drs. H. AMBOK TUO, MM
Pembina Utama Muda Madya
Nip. 19590527 198503 1 009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016–2021 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah selama lima tahun yang akan datang.

Dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis (*RENSTRA*) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh unit kerja atau Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka penyusunan Revisi Rencana Strategis Sekretariat Daerah ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Penyusunan Revisi Rencana Strategis ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Revisi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa yang akan datang pada khususnya.

Kuala Tungkal, 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Ir.H.AGUS SANUSI,M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19680817 199203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
Bab II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	8
2.2 Sumber daya Sekretariat Daerah	21
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah	42
Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	44
3.1 Indikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan setda.....	48
3.2 Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih	45
3.3 Telaahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.....	51
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	62
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	64

Bab IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	67
4.1	Visi dan Misi Sekretariat Daerah	67
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Setda	68
4.3	Strategi dan Kebijakan Setda	74
Bab V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	83
Bab VI	INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	84
Bab VII	PENUTUP.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	22
Tabel II.2	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2011 – 2016	24
Tabel II.3	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2015	39
Tabel II.4	Rekapitulasi Anggaran dan Rata-Rata Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016	40
Tabel II.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2016.....	41
Tabel III.1	Komparasi sasaran Renstra Setda Kab. Tanjung Jabung Barat terhadap sasaran Renstra Setda Provinsi Jambi dan Renstra Kementerian Dalam Negeri	54
Tabel IV.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	69
Tabel IV.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021	71
Tabel IV.3	Identifikasi Lingkungan Strategis	78
Tabel IV.4	Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI)	79
Tabel IV.5	Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE)	80
Tabel V	Rencana Program dan Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan.....	
Tabel VI	<i>Cascading</i> Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah terhadap Indikator Renstra	85

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005–2025 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005–2025. Penyusunan Revisi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Revisi Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Revisi Renstra oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Revisi Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarulangun Bangko, Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabiupaten di Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 8 tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
21. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang perubahan Nomenklatur SKPD Penanggungjawab RPJMD Kab. Tanjab Barat Tahun 2016-2021 pada Perda Kab. Tanjab Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kab. Tanjab Barat Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Revisi Rencana Strategis ini adalah menjamin adanya suatu keterkaitan, kesinergisan dengan RPJMD dalam setiap perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan oleh Bagian- Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sedangkan tujuan penyusunan Revisi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renja,

RKT dengan Renstra

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan memuat penjelasan mengenai Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan

BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan

kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

Bab II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
3. Pelaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, dipimpin Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dan menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan fungsi koordinasi perumusan kebijakan;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c) Pelaksanaan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana, keuangan, asset, hubungan masyarakat dan protokol;
- d) Pelaksanaan fungsi pemerintahan yang tidak tercakup dalam tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- e) Pelaksanaan penanganan urusan kerjasama dan perbatasan;
- f) Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana sekretariat daerah;
- g) Pelaksanaan pelayanan asistensi / konsultasi lingkup tugas; dan
- h) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut :

a. Sekretaris Daerah :

1. Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
 - a) penyelenggaraan fungsi koordinasi perumusan kebijakan;
 - b) pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c) pelaksanaan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana, keuangan, asset, hubungan masyarakat dan protokol;
 - d) pelaksanaan fungsi pemerintahan yang tidak tercakup dalam tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - e) pelaksanaan penanganan urusan kerjasama dan perbatasan;

- f) pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana sekretariat daerah;
- g) pelaksanaan pelayanan asistensi / konsultasi lingkup tugas; dan
- h) pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dibidang pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
 - a) pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan keagamaan, hukum, serta komunikasi dan dokumentasi;
 - b) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembedangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembedangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d) pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan keagamaan, hukum, serta komunikasi dan dokumentasi; dan
 - e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

1. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris daerah di bagian pemerintahan dan Otonomi Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian;

- b) perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, otonomi daerah dan aparatur pemerintahan, serta administrasi kewilayahan dan kerjasama;
- c) pengoordinasian pelaksanaan program dan pelayanan dibidang tata pemerintahan, otonomi daerah dan aparatur pemerintahan, serta administrasi kewilayahan dan kerjasama;
- d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, otonomi daerah dan aparatur pemerintahan, serta administrasi kewilayahan dan kerjasama; dan
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan

1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris daerah di bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian;
 - b) perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat, sosial, dan keagamaan;
 - c) pengoordinasian pelaksanaan program dan pelayanan di bidang kesejahteraan rakyat, sosial, dan keagamaan;
 - d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat, sosial, dan keagamaan;
 - e) penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian; dan
 - f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bagian Hukum

1. Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris daerah di bagian Hukum.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Bagian Hukum mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian;
- b) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang perumusan produk hukum daerah, dokumentasi dan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pelayanan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah;
- c) penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d) pengumpulan bahan perumusan penyusunan produk hukum daerah;
- e) fasilitasi penetapan produk hukum daerah;
- f) penyusunan himpunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum Daerah;
- g) pengharmonisasian produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- h) pelaksanaan pendokumentasian dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah secara konvensional dan/atau elektronik;
- i) pelaksanaan penyiapan Rancangan Peraturan Daerah yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- j) pengkajian dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah;
- k) penyusunan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah (PROPEMPERDA);
- l) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perumusan kebijakan penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan sosialisasi produk hukum serta pelayanan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah;
- m) pelaksanaan pelayanan administratif dan teknis pembinaan hak asasi manusia; dan
- n) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

D. Bagian Humas dan Protokol

1. Kepala Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris daerah di bagian Komunikasi dan Dokumentasi.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian;
 - b) perumusan kebijakan di bidang komunikasi pimpinan, serta dokumentasi dan infomasi;
 - c) pengoordinasian pelaksanaan program dan pelayanan di bidang komunikasi pimpinan, serta dokumentasi dan infomasi;
 - d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi pimpinan, serta dokumentasi dan infomasi; dan
 - e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan :

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a) perumusan kebijakan di bidang sumber daya alam, perekonomian, dan administrasi pembangunan;
 - b) pengoordinasian pelaksanaan program di bidang sumber daya alam, perekonomian, dan administrasi pembangunan;
 - c) pelayanan administrasi di bidang sumber daya alam, perekonomian, dan administrasi pembangunan;
 - d) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program di bidang sumber daya alam, perekonomian, dan administrasi pembangunan; dan
 - e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Bagian Sumber Daya Alam

1. Kepala Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris daerah di bagian Sumber Daya Alam.
 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian;
 - b) perumusan kebijakan di bidang pertanian dan kehutanan, ketahanan pangan, perikanan dan sumber daya air, serta lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral;
 - c) pengoordinasian pelaksanaan program dan pelayanan dibidang pertanian dan kehutanan, ketahanan pangan, perikanan dan sumber daya air, serta lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral;
 - d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dan kehutanan, ketahanan pangan, perikanan dan sumber daya air, serta lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral; dan
 - e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- B. Bagian Perekonomian
1. Kepala Bagian Perekonomian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris daerah di bagian Perekonomian.
 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Perekonomian mempunyai fungsi
 - a) penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian;
 - b) perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan BUMD, perindustrian dan perdagangan, serta koperasi, ukm dan keteangakerjaan;
 - c) pengoordinasian pelaksanaan program dan pelayanan di bidang penanaman modal dan BUMD, perindustrian dan perdagangan, serta koperasi, ukm dan ketenagakerjaan;
 - d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan BUMD, perindustrian dan perdagangan, serta koperasi, ukm dan ketenagakerjaan; dan
 - e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bagian Administrasi Pembangunan

1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris daerah di bagian Administrasi Pembangunan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian;
 - b) perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
 - c) pengoordinasian pelaksanaan program dan pelayanan di bidang administrasi pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
 - d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan; dan
 - e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bagian Pengadaan Barang/Jasa

1. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris daerah di bagian Pengadaan Barang/Jasa.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian;
 - b) pengelolaan pengadaan barang /jasa;
 - c) pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - d) pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
 - e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Asisten Administrasi Umum :

1. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dibidang Administrasi Umum.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan penyusunan kebijakan, koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan dan penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b) perumusan kebijakan di bidang organisasi dan tatalaksana, umum dan ketatausahaan, serta sarana dan prasarana;
- c) pengoordinasian pelaksanaan program di bidang organisasi dan tatalaksana, umum dan ketatausahaan, serta sarana dan prasarana;
- d) pelayanan administrasi di bidang organisasi dan tatalaksana, umum dan ketatausahaan, serta sarana dan prasarana;
- e) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program di bidang organisasi dan tatalaksana, umum dan ketatausahaan, serta sarana dan prasarana; dan
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Bagian Organisasi

1. Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris daerah di bagian Organisasi.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Organisasi mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian;
 - b) perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan kepegawaian, tata laksana dan pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
 - c) pengoordinasian pelaksanaan program dan pelayanan di bidang kelembagaan dan kepegawaian, tata laksana dan pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
 - d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan kepegawaian, tata laksana dan pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi; dan
 - e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

B. Bagian Umum

1. Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris daerah di bagian Umum.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian;
 - b) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keuangan pimpinan dan setda;
 - c) pelaksanaan urusan rumah tangga pimpinan;
 - d) pelaksanaan keprotokolan;
 - e) pengelolaan arsip dan persuratan; dan
 - f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bagian Sarana dan Prasarana

1. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris daerah di bagian Sarana dan Prasarana.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian;
 - b) perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana lingkup sekretariat daerah;
 - c) pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana lingkup sekretariat daerah;
 - d) penatausahaan sarana dan prasarana lingkup sekretariat daerah;
 - e) pengaturan pendistribusian dan penggunaan sarana dan prasarana lingkup sekretariat daerah;
 - f) pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkup sekretariat daerah;
 - g) pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana secara administrasi dan fisik;
 - h) penyusunan laporan aset sekretariat daerah; dan
 - i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Staf Ahli

1. Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
2. Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
3. Staf Ahli, terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.

B. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten.

Asisten terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum. Masing-masing asisten membawahi bagian, sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membantu Sekretaris Daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi :
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, mencakup :
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan.
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Aparatur Pemerintahan.
 - c) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan dan Kerjasama.
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan, mencakup :
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - b) Sub Bagian Sosial.
 - c) Sub Bagian Keagamaan.
 - 3) Bagian Hukum, mencakup :
 - a) Sub Bagian Produk Hukum Daerah.

- b) Sub Bagian Bantuan Hukum,
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi.
- 4) Bagian Humas dan Protokol, mencakup :
- a) Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan,
 - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi,
 - c) Sub Bagian Protokol.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membantu Sekretaris Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan, yang membawahi :

- 1) Bagian Administrasi Pembangunan, mencakup :
 - a) Sub Bagian Administrasi Perencanaan Pembangunan.
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.
- 2) Bagian Sumber Daya Alam, mencakup :
 - a) Sub Bagian Pertanian dan Kehutanan.
 - b) Sub Bagian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Sumber daya Air.
 - c) Sub Bagian Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber daya Mineral.
- 3) Bagian Perekonomian, mencakup :
 - a) Sub Bagian Penanaman Modal dan BUMD.
 - b) Sub Bagian Peindustrian dan Perdagangan.
 - c) Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Ketenagakerjaan.
- 4) Bagian Pengadaan Barang/Jasa, mencakup :
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

c. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum membantu Sekretaris Daerah di bidang administrasi dan umum yang membawahi :

- 1) Bagian Organisasi, mencakup :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Kepegawaian.
 - b) Sub Bagian Tata laksana dan Pelayanan Publik.
 - c) Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- 2) Bagian Umum, mencakup :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan.
 - b) Sub Bagian Protokol
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan.

- 3) Bagian Sarana dan Prasarana, mencakup :
 - a) Sub Bagian Sarana.
 - b) Sub Bagian Prasarana.
 - c) Sub Bagian Penatausahaan Sarana dan Prasarana.

3. Staf Ahli

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya kepada Bupati.

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki SDM yang cukup beragam. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki pegawai sebanyak 292 orang, yang terdiri dari 121 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 13 Orang Tenaga Kerja Sukarela (TKS), 118 Orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan 40 Tenaga Harian Lepas (THL).

Jumlah pegawai eselon II sebanyak 4 pegawai, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, serta 3 Staf Ahli. Eselon III dan IV masing-masing sebanyak 10 yaitu para kepala bagian orang dan 29 orang, kepala subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dari seluruh jumlah pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat PNS, TKS, TKK dan THL yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 9 orang, yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 94 orang, yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 6 orang, yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 168 orang, yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 10 orang dan pegawai yang memiliki pendidikan SD sebanyak 5 orang.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2011- 2015 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2011-2016 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel II.2
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2011 – 2016

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ADP	Peningkatan pengetahuan aparatur dan penyedia jasa terhadap penerapan sistem E-procurumet			320	90	80	80	80	80	90	90	90	-	-					
	Pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik			45	10	15	460	90	90	10	15	460	-	-					
	Peningkatan kemampuan Aparatur dan masyarakat jasa konstruksi			450	80	90	90	80	90	80	110	80	90	90					
	Tersedianya data kegiatan fisik dan data pengadaan Brg/Jasa.			175	20	30	30	50	50	10	50	23	-	-					
	Meningkatkan intensifitas koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka mewujudkan efisiensi efektivitas kualitas pembangunan daerah.			95	100	85	95	-	-	99,5	85	95	-	-					
	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintah dlm pelaksanaan pengadaan brg/jasa Pemerintah.			290	115	115	100	135	135	95	115	80	-	-					
				399	90	90	80	80	100	90	109	120	80	-					

		Terlaksanannya kegiatan operasional LPSE pengadaan Barang / jasa Kab. Tanjab Barat dan Peningkatan SDM Pengelola LPSE			100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100					
					12	-	-	-	8	12	-	-	-	8	12					
		Meningkatkan kemampuan aparatur pengelolaan LPPK pada SKPD kab. Tanjab Barat dan tersedianya data proyek fisik pengadaan barang jasa			60	-	-	-	60	60	-	-	-	60	-					
					80	-	-	-	40	40	-	-	-	40	40					
					1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-					
		Tersedianya data informasi tentang LPPK, RENJA, RKT, rekap program, Tapkin dan Lakip Setda			150	-	-	-	75	75	-	-	-	75	75					
		Terlaksanannya Pengadaan Barang / Jasa Melalui Sistem Elektronik				-	-	-	100	100	-	-	-	81,9	60,50					
		Meningkatnya SDM Aparatur Pengelola ULP dan Pokja ULP				-	-	-	60	-	-	-	-	60	-					
		Tercapainya Efisiensi Pengadaan Barang / Jasa				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100					
		Tersedianya Buku SOP Unit Layanan Pengadaan (ULP)				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100					
						-	-	-			-	-								
ORG		Terlaksanannya Evaluasi pelayanan publik				5000 lbr 150 bk peraturan 500 bk perpus takaan 5 paket	5000 lbr 150 bk peraturan 500 bk perpus takaan 5 paket	1 dok	1 dok	1 dok	100%	100%	100%	100%	100%					
		Tersedianya Dokumentasi Indeks Kepuasan Masyarakat				-	-	1 dok	1 dok	1 dok	-	-	100%	100%	100%					

		Tersedianya Laporan harta kekayaan pejabat negara					32 LHKPN	32 LHKPN	32 LHKPN					95 LHKPN					
		Terlaksananya pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu di kecamatan					5 kecamatan					100%							
		Dokumen penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			3500 lbr 670 bk peraturan 11 papan struktur 5 paket	3500 lbr 670 bk peraturan 11 papan struktur 5 paket	2 dok	2 dok	2 dok	100%	100%	100%	100%	100%					
		Terselenggaranya sosialisasi tata naskah dinas					100 org					100%							
		Tersedianya dokumen LAKIP						3 dok	3 dokn				100%	100%					
		Terlaksananya reformasi birokrasi						1 dok	1 dok					100%					
		Tersedianya Administrasi kepegawaian Setda			6 buku	6 buku	6 buku	6 buku	6 buku	100%	100%	100%	100%	100%					
		Tersedianya Dokumen Analisis Jabatan					47 SKPD	47 SKPD	47 SKPD			100%	100%						
		Terlaksananya Bimtek Evaluasi Jabatan					100 org					100%							
akrk		terlaksananya varifikasi terhadap bahan-bahan kelengkapan bantuan		13 kecamatan		13 kec	13 kec	13 kec	13 kec		13 kec	13 kec	13 kec	13 kec					
		Terlaksananya pemberangkatan dan pemulangan 179 jamaah haji serta pengiriman TKHD		200 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	305 Orang	280 Orang	179 Orang	318 Orang	281 Orang					
		Terlaksananya pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah serta penyaluran ZIS		13 kecamatan		13 kec	13 kec	13 kec	13 kec		13 kec	13 kec	13 kec	13 kec					
		Terlaksananya kegiatan pertemuan Tim pembina UKS Tingkat kecamatan dan Kabupaten		13 kecamatan		13 kec	13 kec	13 kec	13 kec		13 kec	13 kec	13 kec	13 kec					

		Terbentuknya Bintek UKS tingkat kecamatan dan kabupaten			13 kecamatan				13 kec				13 kec					
		Terlaksananya kegiatan Pramuka Tanjab barat					Keg. Pramuka					Keg. Pramuka Tanjabba						
		Tercapainya kinerja Legiun veteran dan Dewan Harian cabang 45					Kinerja legiun veteran dan Dewan					Kinerja legiun veteran dan Dewan						
		Terlaksananya kegiatan Festival Anak Sholeh (FASI) Tingkat Kec, Kab, dan prov			100 Anak sekolah			100 Anak sekolah	100 Anak sekolah	100 Anak sekolah			100 Anak sekolah	100 Anak sekolah	100 Anak sekolah			
		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Keluarga Lansia Kab. Tanjab Barat			3 Kali			3 Kali	3 Kali	3 Kali			1 Kali	1 Kali				
		Pelaksanaan MTQ Tk. Kabupaten Tahun 2013 di Kab. Tanjab Barat			13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.			
		Pelaksanaan Kegiatan Training Center (TC) Kafilah MTQ Kab. Tanjab Barat			3 kali TC	3 kali TC	3 kali TC	3 kali TC	3 kali TC	3 kali TC	3 kali TC	3 kali TC	3 kali TC	3 kali TC	3 kali TC			
		Pengiriman Kafilah MTQ Kab. Tanjab Barat pada MTQ Tk. Prov. Jambi			64 Kafilah	80 Kafilah	80 Kafilah	80 Kafilah	80 Kafilah	80 Kafilah	64 Kafilah	64 Kafilah	64 Kafilah	64 Kafilah	64 Kafilah			
		Pembinaan 134 Da'i pedesaan/kelurahan agar terlaksananya pembinaan keagamaan di desa/kelurahan			134 Da'i	134 Da'i	134 Da'i	134 Da'i	134 Da'i	134 Da'i	67 Da'i	61 Da'i	131 Da'i	134 Da'i	134 Da'i			
		Terlaksananya 4 kali pembinaan Qori dan Qoriah dalam wadah LPTQ Kab. Tanjab Barat			3 kali pembinaan	3 kali pembinaan	3 kali pembinaan	3 kali pembinaan	3 kali pembinaan	3 kali pembinaan	3 kali pembinaan	3 kali pembinaan	3 kali pembinaan	3 kali pembinaan	3 kali pembinaan			
		Terlaksananya Syiar agama : maulid Nabi, Isra Miraj, Nuzul quran, malam tahun baru Hijriah			4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali			

		Terlaksananya kegiatan amaliyah Ramadhan dan dua hari raya guna meningkatkan kegiatan syiar agama			13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.					
AEK		Termonitornya perkembangan investasi dan BUMD			8 Kali	10 Kali	12 Kali	15 Kali	20 Kali	20 Kali	10 Kali	11 Kali	15 Kali	12 Kali	16 Kali				
		Penyelesaian konflik lahan			8 Kali		8 Kali	10 Kali	-	-		4 Kali	6 Kali	-	-				
		Terlaksananya rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi perekonomian kab. Tanjab barat			13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.				
		Terlaksananya pengembalian, monitoring dan evaluasi KUPEM			13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.				
		Terlaksananya penyaluran raskin tepat sasaran			13.012 RTS	13.012 RTS	13.012 RTS	15.394 RTS	15.394 RTS	15.394 RTS	13.012 RTS	13.012 RTS	15.394 RTS	15.394 RTS	15.394 RTS				
		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah			13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.				
		Terlaksananya monitoring dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi			13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.				
		Terlaksananya rapat koordinasi usaha industri dan migas			13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.				
HKM		Tersedianya produk Perundang-undangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%									
						2000 perda	4250 perda	2700 perda	4500 perda		2000 perda	2550 perda	2700 perda	4500 perda					
						300 Himpunan Perda	300 Himpunan Perda	300 Himpunan Perda	600 Himpunan Perda	100 Himpunan Perda	300 Himpunan Perda	300 Himpunan Perda	250 Himpunan Perda	600 Himpunan Perda	100 Himpunan Perda				
						250 PUU Pusat	300 PUU Pusat	600 PUU Pusat	600 PUU Pusat		250 PUU Pusat	300 PUU Pusat	250 PUU Pusat	600 PUU Pusat					

		Terciptanya keharmonisan dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan			100%	100%	100%	100%	100%										
						1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	-				
						1000 Buku	200 Buku	200 Buku	200 Buku		1000 Buku	150 Buku	192 Buku	130 Buku					
		Terciptanya supremasi Hukum			100%	100%	100%	100%	100%	100%									
						12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	15 Kasus	10 Kasus	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4 Kasus	10 Kasus				
		Mengurangi Tindakan yang melanggar Hukum			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%								
						5 Desa	5 Desa	8 Desa	8 Desa		5 Desa	5 Desa	8 Desa	8 Desa					
						1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
		Tersedianya aturan sebagai dasar dalam melaksanakan roda pembangunan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	-								
						12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	15 Perda	13 Perda		12 Bulan	12 Bulan	11 Perda	13 Kali				
							1 Kali Rakor kabg/kasubg	1 Kali Rakor kabg/kasubg				1 Kali Rakor kabg/kasubg							
		Mengurangi tindakan yang melanggar HAM			100%	100%	100%	100%	100%	100%									
						1 Kali pembinaan Kadarkum	1 kali Rakor RANHAM	1 kali Rakor RANHAM	1 Kali Lomba Kadarkum	1 Kali Lomba Kadarkum	1 Kali pembinaan Kadarkum	1 kali Rakor RANHAM	1 kali Rakor RANHAM	1 Kali Lomba Kadarkum	1 Kali Lomba Kadarkum				
						1 Kali Pembekalan RANHAM			2 kali monitoring HAM	2 kali monitoring HAM	1 Kali Pembekalan RANHAM			2 kali monitoring HAM	2 kali monitoring HAM				
									1 Kali Pembekalan Ranham	1 Kali Pembekalan Ranham				1 Kali Pembekalan Ranham	1 Kali Pembekalan Ranham				
HMS		Meningkatnya Program acara siaran RSPD yang bermutu, dinamis, membangun sesuai			5 Paket Acara	5	6	6	8	8	6	6	8	8	8				

	Standar Penyiaran Indonesia (SPI), tersedianya sumber daya dan jangkauan layanan siaran maksimal			11 Kec	11	11	13	13	13	11	13	13	13	13				
	Meningkatnya Program acara siaran LPPL Tungkal televisi yang bermutu, dinamis, membangun dan berimbang sesuai Standar Penyiaran Indonesia (SPI), tersedianya sumber daya dan jangkauan layanan siaran maksimal			6 Program Acara Siaran	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
				1 Kec	1	1	2	5	13	1	2	5	13	13				
PDES	Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan kekayaan dan asset Desa			20%	56 Desa	114 Desa	114 Desa	114 Desa	114 Desa	56 Desa	97 Desa	114 Desa	114 Desa	114 Desa				
	Terbentuknya Tim pengelolaan anggaran dana desa			20%	-	-	-	14 Tim	14 Tim	-	-	-	14 Tim	14 Tim				
	Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan desan tentang APBDesa			20%	-	-	-	114 Desa	-	-	-	-	114 Desa	-				
	Bertambahnya jumlah desa dalam kab. Tanjab Barat			20%	60 Desa	60 Desa	60 Desa	-	-	60 Desa	60 Desa	60 Desa	-	-				
	Terlaksananya Pilkades			33%	8 Kades	8 Kades	70 Kades	-	27 Kades	6 Kades	8 Kades	57 Kades	-	27 Kades				
	Terlaksananya forum komunikasi RT di masing-masing kecamatan			33%	-	-	-	13 Kec.	13 Kec.	-	-	-	-	13 Kec.				
	Terlaksananya pembinaan manajemen pemerintahan desa bagi Kades			20%	56 Desa	114 Desa	114 Desa	114 Desa	-	54 Desa	114 Desa	114 Desa	114 Desa	-				
	Terlaksananya pelatihan bagi Bendaharawan Desa			20%	-	-	-	114 Bend. Desa	-	-	-	-	114 Bend. Desa	-				
	Terlaksananya bimbingan teknis bagi lurah			20%	-	-	-	20 Lurah	-	-	-	-	20 Lurah	-				

		Terlaksananya pelatihan bagi Badan permusyawaratan desa			20%	-	-	-	114 BPD	-	-	-	-	114 BPD	-				
		Terlaksananya koordinasi pemerintahan desa			50%	-	-	-	134 Desa/Kel	134 Desa/Kel	-	-	-	134 Desa/Kel	134 Desa/Kel				
APU		Termotivasinya aparatur kecamatan dalam meningkatkan kinerja			100%	3 org camat	3 org camat	3 org camat	3 org camat	3 org camat	3 org camat (terbaik, I, II, III)	3 org camat (terbaik, I, II, III)	3 org camat (terbaik, I, II, III)	3 org camat (terbaik, I, II, III)	3 org camat (terbaik, I, II, III)				
		Terwujudnya kinerja aparatur pemerintah yang meningkat dengan Good Governace			100%	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.				
		Termotivasinya aparatur kecamatan dalam meningkatkan kinerja			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Terwujudnya situasi yang kondusif dalam wilayah Kab. Tanjab Barat			100%	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus				
		Terwujudnya tertib adm. Batas pemerintahan Kab. Tanjab Barat dengan Kab. Yg berbatasan serta batas kec. Dan desa			100%	2 batas	3 batas	4 batas	5 Batas	6 Batas	2 batas	3 batas	2 batas (1 Batas kab dan 1 batas kec	5 Batas (12 batas kab, 1 batas kec, 3 batas desa)	12 batas				
		Terwujudnya tertib penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di wilayah Tanjab Barat			100%	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali				
		Terwujudnya tertib adm. Di bidang pembakuan nama rupa bumi			0%	-	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	-	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.				
		Terwujudnya kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah bagi masy. Miskin			100%	1600 percil sertifikat	1000 percil sertifikat	500 percil sertifikat	500 percil sertifikat	30 percil sertifikat	1600 percil sertifikat	1000 percil sertifikat	500 percil sertifikat	500 percil sertifikat	30 percil sertifikat				

		Terciptanya koordinasi yang baik bidang pemerintahan dan tersedianya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)			0%	-	-	50 Buku	50 Buku	60 Buku	-	-	50 Buku	50 Buku	60 Buku				
		Menumbuh kembangkan rasa nasionalisme kepada bangsa dan negara			0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Terlaksananya komunikasi dan koordinasi antar pimpinan daerah dan meningkatkan			0%	-	-	12 Kali	12 Kali	12 Kali	-	-	12 Kali	12 Kali	12 Kali				
		terlaksanya PATEN di kecamatan			0%	-	-	-	-	13 Kec.	-	-	-	-	13 Kec.				
		Meningkatnya pengetahuan & kemampuan aparatur dalam melaksanakan penyusunan LPPD.			0%	-	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	-	-	1 Kali (116 orang peserta)	-	-				
ASSET		Kendaraan Dinas/Operasional			90%	90%	90%	90%	95%	3 Unit									
		Jaminan Asuransi Barang Milik Daerah			4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	8 Paket	1 Paket									
		Tersusunnya Daftar mutasi barang milik daerah tahunan yang berkelanjutan			249 Buku	249 Buku	249 Buku	249 Buku	260 Buku	10 Buku									
		Buku Standar satuan harga tahun anggaran 2017			200 Buku	200 Buku	200 Buku	200 Buku	210Buku	150 Buku									
		Tersusunnya Arsip Asset Daerah			85%	85%	85%	85%	95%	Tersusunnya Arsip Asset Daerah									

		Terlaksananya pengamanan, pemeliharaan dan persertifikatan tanah milik Pemkab Tanjab Barat			20 Lokasi, 3 Dokumen	58 Lokasi												
		Terlaksananya pemindahtanganan barang milik daerah			1 Data / Laporan	1 Data / Laporan												
		Tersusunnya rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah			166 Buku	166 Buku	166 Buku	166 Buku	176 Buku	10 Buku								
		Buku Inventaris SKPD dan Kabupaten			90%	90%	90%	90%	95%	7 Buku								
UMU	M	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran secara lancar			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				
		Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor			29 Paket	29 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	29 Paket	15 Paket						
		Meningkatnya Disiplin aparatur			439 Stel	439 Stel	449 Stel	449 Stel	449 Stel	455 Stel	439 Stel	449 Stel	449 Stel	455 Stel	460 Stel			
		Meningkatnya keahlian/kapasitas sumberdaya aparatur			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket				
		Tersusnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja SKPD			30 Buku	30 Buku	30 Buku	30 Buku	30 Buku	30 Buku	30 Buku	30 Buku	30 Buku	30 Buku				
		Terciptanya laporan keuangan akhir tahun sebagai alat dalam proses evaluasi yang menyangkut tentang penerimaan dan pengeluaran dalam kegiatan pengelolaan keuangan di lingkup setda			15 Buku	15 Buku	15 Buku	15 Buku	15 Buku	15 Buku	15 Buku	15 Buku	15 Buku	15 Buku				

		Terlaksananya penerimaan kunjungan tamu dan terpeliharanya kesehatan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				
KEU		Terlaksananya laporan keuangan			Tersusunnya laporan keuangan semesteran	-	-	150 Buku											
		Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu			Buku Laporan Keuangan	-	-	320 Buku	200 Buku	200 Buku									
		Terlaksananya penyusunan rancangan Perda			Tersusunnya rancangan Perda	-	-	Buku	Buku	Buku									
		Terlaksananya penyusunan rancangan penjabaran APBD			Tersusunnya rancangan penjabaran APBD	-	-	Buku	Buku	Buku									
		Terlaksananya penyusunan rancangan perubahan Perda			Tersusunnya rancangan perubahan Perda	-	-	Buku	Buku	Buku									
		Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH			Tersusunnya rancangan peraturan KDH	-	-	Buku	Buku	Buku									
		Terciptanya Informasi Keuangan Daerah berupa Daftar Gaji			Kelancaran pembayaran Gaji PNS	-	-												
		Terlatihnya Pengelolaan Keuangan Unit Kerja			Peningkatan sumber daya manusia	-	-		67 Orang	90 Orang									

		Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian kas			Terciptanya laporan arus kas yang transparan dan akuntabel			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan								
		Buku RAPBD dan APBD			Tersusunnya rancangan Peraturan Daerah tentang APBD													
		Buku RAPBD dan APBD Penjabaran			Tersusunnya rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD													
		Terwujudnya pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Teknologi Informasi komputerisasi			Tersedianya Jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah					214,726,736	568,897,500							
		Efisiensi Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah			Terhubungnya Sistem Informasi ke SKPD				70%	70%			609,890,640	977,403,650	967.738.400			
					Meningkatnya Jaringan Komunikasi Sistem informasi Keuangan Daerah				14 SKPD	14 SKPD								
		Terciptanya pelayanan penatausahaan keuangan daerah dengan menggunakan system loket			Meningkatnya pelayanan keuangan daerah yang baik			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	259,074,000	871,431,000	962,441,000	942,624,500	1.001.519.600			

	Laporan Realisasi Anggaran Dana TP dan UB			Buku Laporan Realisasi Dana TP dan UB		100 Buah	120 Buku	120 Buku		109,346,000	103,348,000	168,329,200	160.232.000				
	Terciptanya informasi keuangan daerah berupa daftar gaji / pemeliharaan Simda Gaji			Kelancaran pembayaran Gaji PNS pembayaran pada DPA-PPKD		6 Paket	12 Bulan	12 Bulan		417,685,380	387,779,350	380,353,650	408.206.000				
	Tercapainya informasi keuangan daerah			Terwujudnya kelancaran pembayaran belanja langsung		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		375,537,400	385,819,860	371,076,100	323.770.250				
	Pemberian belanja hibah dan belanja bantuan sosial cepat, akurat dan tepat sasaran			Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan bersih		100%	100%	100%	32,950,000		91,626,600	60,998,000	134.355.200				
	Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah			Terciptanya Pengelolaan Keuangan Daerah yang maksimal		100%					53,788,700						
	Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah			Terciptanya Pengelolaan Keuangan Daerah yang maksimal		100%					182,580,500						
	Laporan realisasi anggaran triwulan			Buku laporan realisasi triwulan dan prognosis			120 Buku	120 Buku				176,841,400	156.214.400				

		Tercapainya koordinasi dan fasilitasi pembangunan bidang pengelolaan hutan, lahan dan tanaman			100%	13 Kec.													
		Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang kehutanan			100%	-	13 Kec.	-	-	-	-	13 Kec.	-	-	-				
		Tercapainya koordinasi dan fasilitasi pembangunan bidang peternakan dan perikanan			100%	13 Kec.													
		Terkoordinasinya sentra ternak di kab. Tanjab barat			100%	-	13 Kec.	-	-	-	-	13 Kec.	-	-	-				
		Tercapainya koordinasi dan fasilitasi pembangunan bidang Lingkungan Hidup			100%	-	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	-	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.				
		Tersusunya naskah akademik kebijakan pengelolaan lingkungan hidup			100%	-	13 Kec.	-	-	-	-	13 Kec.	-	-	-				

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan pencapaian target kinerja, disamping sumberdaya manusia maupun sarana prasarana. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2015

Urai	Anggaran	Realisasi	%
Belanja	191,995,207,463	148,019,545,745	77.10
- Belanja Tidak Langsung	56,528,277,153	26,448,150,065	46.79
- Belanja Langsung	135,466,930,310	121,571,395,680	89.74
Sisa lebih Pembiayaan		43,975,661,718	

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2015 untuk belanja sebesar Rp. 191.995.207.463 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 56.528.277.153 (29,44%) dan belanja langsung sebesar Rp. 135.466.930.310 (70,56%) dapat direalisasi sebesar Rp. 148,019,545,745 (77,10%) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 26,448,150,065 (46,79%) dan belanja langsung sebesar Rp. 121,571,395,680 (89,74%).

Untuk periode pelayanan Tahun 2011-2016 kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.4
 Rekapitulasi Anggaran dan Rata-Rata Realisasi Pendanaan
 Pelayanan Sekretariat Daerah
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja	1,890,989,524,520	1,759,524,947,403	93.05
- Belanja Tidak Langsung	1,370,777,255,211	1,287,622,789,449	93.93
- Belanja Langsung	520,212,269,309	471,902,157,954	90.71
Total Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)		131,464,577,117	

Sumber : Bagian TU Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat (angka Audited 2013)

Total anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 untuk belanja sebesar Rp. 1,890,989,524,520 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 1,370,777,255,211 (72,49%) dan belanja langsung sebesar Rp. 520,212,269,309 (27,51%) dapat direalisasi sebesar Rp. 1,759,524,947,403 (93.05%) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 1,287,622,789,449 (93.93%) dan belanja langsung sebesar Rp. 121,571,395,680 (90.71%).

Secara lengkap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2016 sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (6-	18 = (11-
BELANJA	574,983,885,5 92	466,964,154,6 66	540,938,621,6 42	116,107,655,1 58	191,995,207,46 3	541,619,224,8 51	456,544,053,5 36	507,801,663,2 37	105,540,460,0 34	148,019,545,745	94.20 %	97.77 %	93.87 %	90.90 %	77.10 %	(76,597,735,626)	(78,719,935,821)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	365,907,837,4 37	386,370,544,7 66	534,035,300,4 42	27,935,295,4 13	56,528,277,15 3	353,477,891,2 35	380,301,898,4 35	501,354,956,5 37	26,039,893,1 77	26,448,150,065	96.60 %	98.43 %	93.88 %	93.22 %	46.79 %	(61,875,912,057)	(65,405,948,234)
BELANJA LANGSUNG	209,076,048,1 55	80,593,609,8 99	6,903,321,2 00	88,172,359,7 45	135,466,930,31 0	188,141,333,6 16	76,242,155,1 01	6,446,706,70 0	79,500,566,8 57	121,571,395,680	89.99 %	94.60 %	93.39 %	90.16 %	89.74 %	(14,721,823,569)	(13,313,987,587)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Lingkungan strategis yang berpengaruh terdiri dari Analisis lingkungan Internal (ALI) terhadap aspek kekuatan (*Strength*) dan aspek kelemahan (*Weakness*) dan analisis lingkungan Eksternal (ALE) terhadap aspek Peluang (*Opportunity*) dan aspek hambatan/ ancaman (*Threat*).

Beberapa faktor kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipandang dari sudut Analisis SWOT, dapat dikemukakan sebagai berikut :

A. Faktor Internal

Faktor internal terdiri dari kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*), merupakan potensi yang terkandung dalam tubuh organisasi / satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Secara rinci faktor internal terdiri dari :

1) Kekuatan (*Strength*) ;

- a. Adanya komitmen pimpinan dan staf yang cukup besar dalam pelaksanaan tupoksi;
- b. Tersedianya sumber daya Manusia dalam jumlah yang cukup;
- c. Adanya kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana dalam jumlah yang cukup;
- e. Kemampuan dan kemauan aparatur jajaran Sekretariat Daerah yang cukup tinggi untuk belajar.

2) Kelemahan (*Weakness*) ;

- a. Motivasi kerja aparatur masih belum merata;
- b. Data pendukung yang valid dan akurat kurang terinventarisir dengan baik;
- c. Kemampuan dan keterampilan aparatur masih kurang dan belum merata;
- d. Kurangnya kemauan untuk berkompetisi dalam pelaksanaan tugas;
- e. Kurangnya koordinasi dalam mendukung mekanisme teamwork.

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terdiri dari Peluang (*Opportunity*) dan Hambatan / Ancaman

(Threat), merupakan faktor yang perlu menjadi perhatian sungguh – sungguh dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Secara rinci faktor eksternal terdiri dari :

- 1) Peluang (*Opportunity*);
 - a. Adanya peraturan perundang-undangan (UU, PP, Keppres, Kepmen) sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Adanya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan;
 - c. Adanya peran serta dan dukungan swasta dan masyarakat yang cukup tinggi;
 - d. Semakin kokoh dan meluasnya kebijakan otonomi daerah dan demokratisasi;
- 2) Hambatan / Ancaman (*Threat*);
 - a. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah;
 - b. Belum optimal mekanisme perencanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - c. Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah secara fluktuatif dan cepat;
 - d. Kurangnya pemerataan kesempatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan aparatur.

Dari hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal maupun eksternal yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, maka disimpulkan isu-isu strategis dalam unsur internal dan eksternal untuk menentukan strategi yang perlu dilakukan oleh Sekretariat Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Bab III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisis isu-isu strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Masalahan pembangunan yang mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu Tahun 2016-2021.

3.1 Indikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi pelayanan setda

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas yang harus menjadi tujuan perbaikan, antara lain :

1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan belum berjalan optimal;
2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi belum terlaksana secara efektif dan efisien;
3. Etos dan disiplin kerja sumber daya aparatur yang efisien, efektif belum membudaya;
4. Sarana dan prasarana kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum sesuai dengan standar kebutuhan;
5. Kompetensi dan distribusi sumber daya aparatur belum merata;
6. Sistem penilaian dan pengukuran kinerja dalam penerapan *reward and punishment* belum optimal;
7. Belum adanya SDM perancang produk hukum daerah;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap Otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 2016 – 2021, adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat

menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain- lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

c. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai

kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*.

Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kabupaten dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah Kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

d. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional re-engineering*) yang „ramping struktur, kaya fungsi“. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai *stakeholder*, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

3.2 Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada lima tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD tahun 2005-2025). Di dalam RPJPD ditegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu Tanjung Jabung Barat Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Visi

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator- indikatornya.

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah;

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS”

Penjabaran dari Visi di atas adalah sebagai berikut :

MAJU berarti daerah yang memiliki standar hidup relatif tinggi serta ekonomi merata. Pendapatan masyarakat meningkat melalui pengembangan industri dan ekonomi kerakyatan.

ADIL berarti kondisi yang ideal secara moral dan material. Anggaran daerah yang pro rakyat meningkat. Terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan yang lebih adil bagi rakyat. Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.

MAKMUR berarti kehidupan masyarakat sejahtera yang terlihat dari menurunnya rasio kemiskinan dan terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

BERMARTABAT berarti suatu kondisi manusia ideal dimana terpenuhinya penghargaan dan segala hak asasi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan derajat, kelengkapan itu mampu mewujudkan cipta rasa dan karyanya yang nyata.

BERKUALITAS berarti meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tergambar pada peningkatan pendapatan dan terjamin pelestarian lingkungan hidup.

Kelima hal tersebut merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi

sebuah panduan dalam memandangi pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat lima tahun mendatang.

2. Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 maka disusun 4 (empat) **Misi** terdiri dari:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas.
2. Membangun kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomi.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas.

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
6. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja.
7. Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan.
8. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya.
9. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan.
10. Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi

Berdasarkan Misi dan Tujuan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Sekretariat Daerah Mengacu Kepada Misi Ke 4 : *"Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik"*.

3.3 Telaahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

Visi Provinsi Jambi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 yaitu **Jambi TUNTAS 2021**, yakni :

Provinsi Jambi Yang **Tertib**, adalah suatu kondisi Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan harmonis.

Provinsi Jambi Yang **Unggul**, merupakan perwujudan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Jambi yang berkualitas untuk menciptakan ekonomi Jambi yang berdaya saing.

Provinsi Jambi Yang **Nyaman**, merupakan suatu kondisi Terwujudnya

kehidupan masyarakat Provinsi Jambi yang Aman, Tentram, dan Damai untuk mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.

Provinsi Jambi Yang **Tanggung**, adalah Terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat Provinsi Jambi yang berkelanjutan dan mampu bersaing dalam globalisasi.

Provinsi Jambi Yang **Adil**, merupakan perwujudan pembangunan yang adil dan merata tanpa ada deskriminasi perbedaan individu, golongan maupun wilayah.

Provinsi Jambi Yang **Sejahtera**, adalah Terwujudnya masyarakat Jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, budaya. Sejahtera ini mengarahkan semua pembangunan Provinsi Jambi pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Provinsi Jambi merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat.

Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi rohani, akal, dan jasad.

Adapun Misi tersebut terdiri dari :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Tabel III .1

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dan Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	Sasaran pada Renstra Provinsi Jambi	Sasaran pada Kementerian Dalam Negeri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kinerja pelayanan kearsipan, pengiriman dan penerimaan Surat dinas, berita-berita dinas, distribusi surat secara tertib, lancar dan tepat waktu.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Meningkatnya pelayanan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
2	Terciptanya ketenangan dan kenyamanan tempat kerja dan meningkatnya Aparatur Sipil Negara			
3	Tersusunnya perencanaan kebutuhan alat penunjang aparatur sipil negara yang sesuai kebutuhan			
4	Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur			
5	Terpeliharanya sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan kinerja			
6	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan pegawai setda dalam skala prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah			
7	Peningkatan jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Bimtek yang berkenaan dengan Tupoksi			
8	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja			

	SKPD			
9	Termotivasinya aparaturnya kecamatan dalam meningkatkan kinerja			
10	Terwujudnya tertib adm. Batas pemerintahan Kab. Tanjab Barat dengan Kab. Yg berbatasan serta batas kec. Dan desa			
11	Terwujudnya tertib penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di wilayah Tanjab Barat	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan		
12	Terwujudnya tertib adm. Di bidang pembakuan nama rupa bumi			
13	Terlaksananya PATEN di kecamatan			
14	Peningkatan kinerja pelayanan iklim investasi dan realisasi investasi			
15	Terlaksananya rapat koordinasi, penyaluran, pengembalian, monitoring dan evaluasi program KUPEM	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan	Terwujudnya keselarasan kebijakan lintas sektoral bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	
16	Terlaksananya rapat koordinasi, penyaluran, monitoring dan evaluasi program raskin			
17	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah			
18	Terlaksananya koordinasi kerjasama daerah			
19	Tersedianya produk Perundang-undangan	Terwujudnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk	Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan
20	Terciptanya supremasi Hukum			

21	Mengurangi Tindakan yang melanggar Hukum	Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintah daerah	demokratis berlandaskan Negara hukum.
22	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan akan isi dan makna yang terkandung dalam setiap produk hukum			
23	Tersosialisasinya produk- produk hukum			
24	Meningkatnya ketaatan masyarakat dan aparatur terhadap peraturan perundang- undangan			
25	Jumlah naskah rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati yang dicatat			
26	Jumlah naskah rancangan peraturan daerah yang didiskusikan			
27	Jumlah peraturan bupati yang diteliti dan dikaji			
28	Mengurangi tindakan yang melanggar HAM			
29	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menerima keluhan/ laporan dari masyarakat			
30	Meningkatnya hasil harmonisasi rancangan produk hokum daerah yang berperspektif HAM			
31	Terlaksananya publikasi kegiatan pembangunan melalui media cetak dalam bentuk society dan advetorial	Meningkatnya SKPD/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Meningkatnya kelembagaan Pemerintah Provinsi Jambi yang tangguh dan handal sesuai prinsip tepat fungsi dan tepat	
32	Terdiseminasinya informasi			

	melalui media internal		ukuran.	
33	Terlaksananya penyebaran informasi melalui media tradisional			
34	Terwujudnya dokumentasi kegiatan pembangunan dalam bentuk foto, berita bergambar, pidato bupati, album kegiatan, kliping berita analog dan digital.			
35	Tersusunnya laporan keuangan per tahun anggaran sehingga diketahui capaian keuangan dalam anggaran tersebut	Meningkatnya Standar Pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit Kerja		
36	Jumlah penataan perangkat OPD			
37	Jumlah revisi peraturan bupati tentang tupoksi			
38	Jumlah regulasi ketatalaksanaan			
39	Jumlah standar operasional prosedur			
40	Jumlah SOP yang diterapkan oleh SKPD			
41	Hasil indek kepuasan masyarakat			
42	Perentase capaian standar pelayanan minimal (SPM)			
43	Tersedianya instrumen kompetensi jabatan			
44	Meningkatnya kinerja aparatur			
45	Terlaksananya tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah serta tercukupinya kebutuhan pelayanan penerimaan tamu			
46	Persentase penilaian pelaporan kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
47	Terpenuhinya laporan kinerja			

	instansi pemerintahan / LAKIP SETDA			
48	Terciptanya koordinasi yang baik bidang pemerintahan dan tersedianya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	Meningkatnyanya fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama Daerah		
49	Meningkatnya pengetahuan & kemampuan aparatur dalam melaksanakan penyusunan LPPD.			
50	Terlaksananya komunikasi dan koordinasi antar pimpinan daerah dan meningkatkan pembangunan keamanan dan kerjasama atas tanah yang dimiliki			
51	Menumbuhkan semangat dan kecintaan terhadap Al-Qur'an dan mampu menjadikan silaturahmi antar sesama umat	Meningkatnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama masyarakat yang agamis, bermoral, serta Harmonis	
52	Guna menggali potensi Qori-qoriah sekaligus sebagai persiapan menghadapi MTQ Tingkat Provinsi ke- 47			
53	Mencetak para generasi Qur'ani yang sejati di Kab. Tanjab Barat			
54	Meningkatkan Pembinaan Qori-qoriah dalam wadah LPTQ			
55	Peningkatan dan pengembangan bagi Guru Agama, Imam, Mudim dan Guru Ngaji			
56	Pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial serta membangun strandar pengelolaan zakat	Meningkatnya kualitas masyarakat dalam sosial budaya	Terwujudnya keselarasan kebijakan lintas sektoral bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

57	Agenda silaturahmi dan saling memaafkan dibulan suci Ramadhan			
58	Meningkatkan Iman dan Taqwa untuk anak usia dini			
59	Maulid Nabi Isra' Mi'raj Nuzul Qur'ani Peingatan Tahun Baru Hijriah			
60	Meningkatkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan Pembangunan akhlak manusia			
61	Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah haji serta Pengiriman TKHD/TPHD			
62	Pembinaan Komda Lansia Lomba			
63	Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan, Kabupaten Dan Provinsi			
64	Fasilitasi MUI Kab. Tanjung Jabung Barat			
65	Pemohon yang belum memiliki buku nikah dan hak pengesahan anak			
66	Peningkatan jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Bimtek yang berkenaan dengan Tupoksi	Meningkatnya Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan Kesehatan.		
67	Peningkatan jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Bimtek yang berkenaan dengan Tupoksi			
68	Meningkatkan SDM pengelola	Meningkatkan keahlian dan	Meningkatnya efektifitas	Mewujudkan keamanan nasional

	laporan kegiatan / LPPK	keterampilan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah sebagai pemberdayaan Pelayanan.	koordinasi/fasilitasi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.	yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
69	Meningkatnya SDM anggota pokja ULP			
70	Terlaksananya pengamatan lapangan dan rapat koordinasi untuk peningkatan kinerja pembangunan bidang tanaman pangan, ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian	Meningkatkan pemahaman masyarakat atas kualitas dan kuantitas produksi daerah.		
71	Terlaksananya pengamatan lapangan dan rapat koordinasi untuk peningkatan kinerja pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan			
72	Tersusunya peraturan kebijakan pencegahan dan terpantaunya alih fungsi lahan			
73	Terlaksananya pengamatan lapangan dan rapat koordinasi untuk peningkatan kinerja pembangunan bidang perikanan dan peternakan			
74	Terlaksananya pengamatan lapangan dan rapat koordinasi untuk peningkatan kinerja pembangunan bidang sumber daya kelistrikan			
75	Terlaksananya pengamatan lapangan dan rapat koordinasi untuk peningkatan kinerja pembangunan bidang mineral dan energi			

76	Terlaksananya pengamatan lapangan dan rapat koordinasi untuk peningkatan kinerja pembangunan bidang lingkungan hidup			
77	Tersusunnya laporan profil sumber daya alam			
78	Terwujudnya rapat koordinasi program peningkatan perekonomian kab. Tanjung Jabung Barat	Berkembangnya ekonomi untuk pencapaian ekonomi kerakyatan yang maju.		
79	Menumbuh kembangkan rasa nasionalisme kepada bangsa dan negara			
80	Terciptanya kondisi tempat kerja yg bersih dan nyaman dan tersedianya peralatan kerja yang baik			
81	Tersusunnya perencanaan kebutuhan alat penunjang operasional aparatur sipil negara yg sesuai kebutuhan	Meningkatnya Perencanaan dan pengembangan infrastruktur berkesinambungan.	Meningkatnya efektifitas koordinasi/fasilitasi penyelenggaraan pembangunan, dan kerjasama daerah.	
82	Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur			
83	Terpeliharanya sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan kinerja			
84	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan pegawai setda dalam skala prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah			
85	terpenuhinya laporan SKPD dan penurunan tingkat pemborosan dalam kegiatan	Meningkatnya pemantauan dan evaluasi pembangunan infrastruktur.		
86	Terpenuhinya pembinaan dan koordinasi perencanaan			

	pembangunan			
87	Tersusunnya dokumen Renstra, Renja dan tapkin dan IKU setda tanjab barat			
88	Tersedianya data pembangunan proyek fisik kab. Tanjab barat			
89	Terpenuhinya pendatan outcome pelaksanaan pembangunan			
90	Terpenuhinya monitoring pelaksanaan pembangunan dan pelaporan hasil monitoring			
91	Terpenuhinya pemantauan dan evaluasi pembangunan			
92	Terpenuhinya pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kabupaten yaitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang Wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Adapun maksud dari penataan ruang kabupaten yaitu :

1. Terwujudnya rencana tata ruang Wilayah yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan;
2. Terwujudnya rencana pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah;
3. Memberi kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang;
4. Memberikan rangsangan partisipasi masyarakat (Investor) untuk melaksanakan Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
5. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
6. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu yang ada di Daerah.

RTRWK berfungsi sebagai :

1. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
3. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
4. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
5. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;

6. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
7. acuan dalam administrasi pertanahan.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :

1. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
2. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
3. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
4. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
5. penataan ruang kawasan strategis kota.

Strategi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah meliputi :

1. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya;
2. Pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu yang berlokasi di Daerah;
3. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan;
4. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengolahan lingkungan;
5. Penatagunaan tanah.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. kebijakan dan strategi struktur ruang;
2. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
3. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Kebijakan struktur ruang kabupaten terdiri atas:

1. Terwujudnya rencana tata ruang Wilayah yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan;
2. Terwujudnya rencana pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah;
3. Memberi kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang;
4. Memberikan rangsangan partisipasi masyarakat (Investor) untuk melaksanakan Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
5. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
6. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu yang ada di daerah.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu- isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten

Tanjung Jabung Barat pada tahun 2016 – 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
5. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah
6. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
7. meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah diidentifikasi sebagai berikut :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah
2. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
3. Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
4. Peningkatan sumber daya aparatur didukung dengan sarana prasarana yang optimal
5. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan masyarakat
6. Penyiapan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya dan memperhatikan kebutuhan masyarakat

Bab IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Sekretariat Daerah

A. Visi

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya.

Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 adalah :

“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Sekretariat Daerah diharapkan mampu sebagai mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melakukan upaya peningkatan kualitas aparatur, sebagai motivator dan koordinator dalam perumusan kebijakan pemerintahan daerah dan menghasilkan kebijakkan yang tepat dan akurat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rumusan visi tersebut dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

Penyelenggara Administrasi Pemerintahan memiliki maksud bahwa Sekretariat Daerah adalah merupakan institusi yang merumuskan, menyusun dan monev atas kebijakan pemerintahan daerah yang tertuang di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan/ Instruksi Bupati serta melakukan pengkoordinasian antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Selain itu, Sekretariat Daerah menjalankan fungsi pembinaan administratif pemerintah daerah yang didasarkan pada ketentuan dan peraturan sehingga menentukan kelancaran dan efektifitas kinerja birokrasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

b. Profesional

Profesional memiliki maksud bahwa Sekretariat Daerah mampu mewujudkan suatu kondisi pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang didukung aparatur dengan keterampilan dan pengetahuan serta sikap/perilaku secara berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap.

c. Responsif

Responsif memiliki maksud bahwa Sekretariat Daerah mampu mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

d. Pelayanan publik (public service)

Pelayanan publik (public service) memiliki maksud bahwa Sekretariat Daerah harus mampu memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*), dan harapan (*expectation*) masyarakat.

B. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

- a. Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, interaksi sosial budaya, hukum, keagamaan dan kemasyarakatan.
- b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang berdaya saing.
- c. Mewujudkan perekonomian berdasarkan keunggulan lokal.
- d. Mewujudkan pengembangan infrastruktur yang kokoh dan berkelanjutan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Setda

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan

untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan Sasaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebanyak 3 (tiga) tujuan dan 6 (enam) sasaran sebagai berikut :

Tabel IV.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Misi	Tujuan
1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.	1. Meningkatnya kualitas tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya.
	2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan melalui pemerintah yang berkualitas dan transparan.
	3. Meningkatkan kepastian hukum dan kualitas pembinaan/pengawasan kinerja pemerintah daerah.

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya kualitas tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya.	1. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya.
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan melalui pemerintah yang berkualitas dan transparan.	2. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik.
	3. Meningkatnya kualitas aparatur pelayanan publik.
	4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan aset daerah.
	5. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

3. Meningkatkan kepastian hukum dan kualitas pembinaan/pengawasan kinerja pemerintah daerah.

6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah (tipeA/B) Kab.Tanjung Jabung Barat.

TABEL IV.2

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
						2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan	Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah	Skor penilaian LPPD Kab. Tanjab Barat.		0	3.2985	3.3305	3<ST≤4 ST	3<ST≤4 ST	3<ST≤4 ST	
			Persentase batas wilayah Kabupaten yang diselesaikan	%	0	100	100	80	100	100	
		Meningkatnya kualitas perencanaan lingkup Setda	Persentase keselarasan perencanaan Setda terhadap RPJMD	%	100	100	100	80	100	100	
			Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pertriwulan		10	10	10	100%	100%	100%	
		Meningkatnya akses informasi pembangunan daerah	Persentase respon positif kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	-	-	-	95	95	100	

Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan kelembagaan yang efektif	Persentase proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa tepat waktu	%	100	100	100	90	90	91	
	Indeks kepuasan masyarakat	%	100	100	100	78	85	90	
	Nilai AKIP Kabupaten		-	-	B	≥ 60.01	≥ 70	≥ 80	
	Persentase OPD Kabupaten tepat ukuran, tepat fungsi	%	65	70	75	70	80	90	
	Persentase sarana dan prasarana lingkup Setda terpenuhi		-	12	12	65%	70%	75%	
	Persentase sarana dan prasarana rumah dinas jabatan terpenuhi	%	-	3 Rumah Dinas 100%	3 Rumah Dinas 100%	80%	85%	90%	
	Indeks kepuasan layanan tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100% 12 Bulan	100% 12 Bulan	100% 12 Bulan	78%	100%	100%	
	Meningkatnya penataan produk hukum daerah	Persentase produk hukum daerah yang tidak saling bertentangan.	%	-	-	100	90	90	95

	Meningkatkan prestasi MTQ	Meningkatnya kualitas Qori' Qori'ah	Peringkat capaian prestasi MTQ Tingkat Provinsi		21 Cabang Lomba	21 Cabang Lomba	21 Cabang Lomba	3 besar	3 besar	3 besar	
	Pengendalian Inflasi Daerah	Terkendalnya laju inflasi	Cakupan Pengendalian terhadap Inflasi		4 ± 1%	4 ± 1%	3,5 ± 1%	3,5 ± 1%	3 ± 1%	3 ± 1%	
	Pengendalian Sumber Daya Alam	Terciptanya pengendalian sumber daya alam yang kondusif	Persentase permasalahan kasus lahan yang diselesaikan	%	100	100	100	60	60	60	

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SETDA

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dilakukan analisis lingkungan strategis, sebagai berikut :

a. Analisis SWOT

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengemban misi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis lingkungan strategis melalui pendekatan *SWOT Analysis* yang terdiri dari analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE).

b. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

1) Kekuatan/*Strenght* (S)

- Sumber daya aparatur Pemerintah Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara kuantitas cukup memadai.
- Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi.
- Adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang luas kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.
- Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2) Kelemahan/*Weakness* (W)

- Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan masyarakat yang berdampak pada penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien.
- Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana yang berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan antara lain kemacetan, banjir, persampahan dan penyediaan sarana air minum dan lain-lain.
- Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

1) Peluang/*Opportunity* (O)

- Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Kuala Tungkal sebagai ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikenal sebagai kota yang aman, nyaman, religius dengan penduduk yang ramah tamah.

- Kuala Tungkal sebagai pusat pendidikan keagamaan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang sekitar karena Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah banyak melahirkan tokoh yang agamis yang terkenal baik di tingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional. Selain itu pula perkembangan pusat perdagangan khususnya barang secondhand dan wisata kuliner yang merupakan unggulan karena mengundang minat pendatang dari Jambi maupun dari daerah lain untuk menghabiskan khususnya waktu akhir pekan yang memberikan omset cukup besar khususnya bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2) *Ancaman/Treaths (T)*

- Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang menjunjung nilai harmoni dan persaudaraan serta persahabatan menjadi masyarakat yang radikal progresif telah menimbulkan konflik yang sangat meresahkan, sehingga mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, hal ini mengancam terhadap pertumbuhan iklim investasi kota yang kondusif.
- Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia membuka peluang terus terjadinya inflasi tinggi, penurunan nilai mata uang dalam negeri dan mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan penurunan intensitas perdagangan dan lemahnya sektor usaha serta jasa yang saat ini banyak menopang sendi-sendi perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak terkendali, disatu sisi pembangunan kota begitu pesat dengan tingginya

minat investasi, tetapi disisi lain terjadi penurunan lahan terbuka hijau yang akan berakibat pada pemanasan global (*global warming*)

Berdasarkan ALI dan ALE tersebut, maka identifikasi lingkungan strategis, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.3
Identifikasi Lingkungan Strategis

INTERNAL	EKSTERNAL
1	2
<p style="text-align: center;"><u>KEKUATAN (STRENGTHS)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya aparatur Pemerintah setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara kuantitas cukup memadai. 2. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi. 3. Adanya pelimpahan urusan kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 4. Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. 5. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah. 6. Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 7. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 	<p style="text-align: center;"><u>PELUANG (OPPORTUNITIES)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 1. Kuala Tungkal sebagai ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikenal sebagai kota yang aman, nyaman, religius dengan penduduk yang ramah tamah. 2. Kuala Tungkal sebagai pusat pendidikan keagamaan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang sekitar karena Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah banyak melahirkan tokoh yang agamis yang terkenal baik di tingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional. Selain itu pula keberadaan barang <i>second/ PJ</i> dan wisata kuliner yang merupakan unggulan pariwisata.
1	2
<p style="text-align: center;"><u>KELEMAHAN (WEAKNESSES)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan. 2. Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana yang berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan. 3. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah. 4. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. 5. Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemda. 6. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 	<p style="text-align: center;"><u>TANTANGAN/ANCAMAN (THREATS)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang radikal progresif. 2. Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia 3. Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 4. Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). 4. Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak terkendali.

Sesuai dengan hasil identifikasi lingkungan strategis dalam tabel di atas, maka setiap faktor baik internal maupun eksternal diberikan pembobotan dan *rating* untuk mendapatkan *scoring* masing-masing faktor yang dituangkan dalam Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE) sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel IV.4
KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI)

NO	FAKTOR INTERNAL STRATEGIS	BOBOT	RATING	SKOR	KESIMPULAN PRIORITAS
<u>KEKUATAN</u>					
1.	Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara kuantitas cukup memadai.	10	4	40	I
2.	Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi.	6	2	12	
3.	Adanya pelimpahan urusan kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.	9	3	27	IV
4.	Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.	10	3	30	III
5.	Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.	8	3	24	V
6.	Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	6	2	12	
7.	Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	7	3	21	
<u>KELEMAHAN</u>					
1.	Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan.	8	4	32	II
2.	Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana perkotaan yang berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan kota.	6	2	12	
3.	Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah.	8	3	24	
4.	Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemda	8	2	16	VI
5.	Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemda.	8	2	16	
6.	Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemda daerah.	6	2	12	
TOTAL		100			

Tabel IV.5

KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAPE)

NO	FAKTOR EKSTERNAL STRATEGIS	BOBOT	RATING	SKOR	KESIMPULAN PRIORITAS
<u>PELUANG</u>					
1.	Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.	15	4	60	I
2.	Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah	10	4	40	II
3.	Kuala Tungkal sebagai ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat. dikenal sebagai kota yang aman, nyaman, religius dengan penduduk yang ramah tamah.	10	3	30	V
4.	Kuala Tungkal sebagai pusat pendidikan keagamaan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang sekitar karena Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah banyak melahirkan tokoh yang agamis yang terkenal baik di tingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional. Selain itu pula keberadaan barang <i>second/ PJ</i> dan wisata kuliner yang merupakan unggulan pariwisata.	10	3	30	VI
<u>ANCAMAN</u>					
1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang radikal progresif.	10	2	20	
2.	Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia	10	4	40	III
3.	Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginya laju urbanisasi	10	4	40	IV
4.	Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai UKM.	5	3	15	
5.	Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	10	3	30	
TOTAL		100			

d. Strategi dan Rencana-Rencana Organisasi

Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian visi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu lima tahun ke depan, maka perlu dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut :

1) Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah.
- b. Meningkatkan dan mendorong motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
- c. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah.
- d. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah.
- e. Mendayagunakan sarana dan prasarana dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- f. Meningkatkan inovasi dan kreativitas seluruh komponen anggota organisasi dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- g. Mengembangkan sistem informasi yang mendukung manajemen pemerintahan daerah secara terpadu dan berkesinambungan.

2) Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T)

- a. Menekan dampak permasalahan sosial dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM.

b. Pengembangan infrastruktur yang berbasis lingkungan.

3) Strategi Kelemahan dan Peluang (W - O)

a. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.

b. Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.

4) Strategi Kelemahan dan Ancaman (W - T)

a. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (*action plan*) dari setiap SKPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan.

b. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka perwujudan "*Good Governance*" melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.

Bab V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (Tahun 2016 – 2021) sebagai berikut :

Bab VI

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam penetapan indikator Sekretariat Daerah sebagai indikator capaian.

Berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021, terdapat indikator Kinerja yang harus diacu dalam Renstra Sekretariat Daerah, indikator Kinerja RPJMD tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya intensitas dan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran lancar
2. Meningkatnya Kelengkapan dan Kualitas Pelayanan Birokrasi
3. Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur
4. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS
5. Terselenggaranya Penyebaran Informasi
6. Meningkatkan Koordinasi Pelestarian SDA dan Flora Fauna Endemik
7. Meningkatkan pengelolaan BUMD dan Peningkatan Investasi lainnya
8. Terwujudnya tertib administrasi batas pemerintahan Kabupaten (ruas batas)
9. Terwujudnya tertib administrasi batas pemerintahan Kecamatan (ruas batas)
10. Terwujudnya tertib administrasi batas pemerintahan Desa/kelurahan (ruas batas)
11. Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
12. Peningkatan sistem pelaksanaan bantuan dan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang transparan
13. Meningkatnya pelayanan administrasi perencanaan pembangunan

14. Peningkatan Pelayanan PATEN di Kecamatan
15. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
16. Terbit dan terlaksananya sistem penyebar luasan informasi secara transparan
17. Peningkatan kualitas dan penyebar luasan produk hukum serta pendampingan hukum (Perda, PerBup, SK)

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel VI
Cascading Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah
 Terhadap Indikator Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA RPJMD	INDIKATOR RENSTRA	SATUAN	TARGET					
				2016	2015	2016	2016	2018	2021
1	Meningkatnya intensitas dan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran lancar	Tingkat intensitas dan kualitas pelayanan administasi yang berjalan dengan lancar	%	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Kelengkapan dan Kualitas Pelayanan Birokrasi	Tingkat kelengkapan dan kualitas pelayanan birokrasi	%	90	95	95	100	100	100
3	Meningkat disiplin dan kinerja aparatur	Tingkat Kedisiplinan dan kinerja aparatur	%	75	80	85	90	95	100
4	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS	Tingkat pengetahuan dan Keterampilan PNS	%	90	95	100	100	100	100
5	Terselenggaranya penyebaran informasi	Penyebaran Informasi tersebar secara merata melalui media massa baik cetak dan elektronik	%	100	100	100	100	100	100
6	Meningkatkan Koordinasi Pelestarian SDA dan Flora Fauna Endemik	Terwujudnya koordinasi yang baik dalam pelestarian SDA dan flora dan fauna endemik	%	100	100	100	100	100	100
7	Meningkatkan pengelolaan BUMD dan peningkatan investasi lainnya	Peningkatan kinerja pelayanan iklim investasi dan realisasi investasi	Kecamatan	13 Kec					

8	Terwujudnya tertib administrasi batas pemerintah kabupaten (ruas batas)	Terlaksananya pemetaan batas-batas yang definitif antar kabupaten	Ruas batas	5	5	6	6	6	6
9	Terwujudnya tertib administrasi batas pemerintah kecamatan (ruas batas)	Terlaksananya pemetaan batas-batas yang definitif antar Kecamatan	Ruas batas	2	2	2	2	2	1
10	Terwujudnya tertib administrasi batas pemerintah desa/kelurahan (ruas batas)	Terlaksananya pemetaan batas-batas yang definitif antar desa/kelurahan	Ruas batas	12	10	10	10	10	10
11	Persentase pelayanan kedinasan Kepala daerah / wakil kepala daerah	Tingkat pelayanan kendinasan kepada daerah dan wakil kepala daerah	%	100	100	100	100	100	100
12	Peningkatan sistem pelaksanaan bantuan dan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang transparan	Tingkat pelaksanaan bantuan dan kegiatan keagamaan dan masyarakat yang transparan	%	100	100	100	100	100	100
13	Meningkatnya pelayanan administrasi perencanaan pembangunan	Tingkat pencapaian tujuan pembangunan	%	80	80	85	90	90	95
14	Peningkatan pelayanan PATEN di Kecamatan	Tingkat pelayanan PATEN di setiap kecamatan	Dok	34	54	54	54	54	54
15	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan publik yang berkualitas	%	74,5	74,5	74,5	75	75	80
16	Terbit dan terlaksananya sistem penyebar luasan informasi secara transparan	Informasi yang akuntabel dan transparan	%	70	70	90	100	100	100
17	Peningkatan kualitas dan penyebar luasan produk hukum serta pendampingan hukum (Perda, PerBup, SK)	Tingkat kualitas dan penyebarluasan produk hukum dan pendampingan hukum	dok	839	839	850	850	850	850

Bab VII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, Pembangunan Jangka Menengah akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Oleh karenanya seluruh program pembangunan jangka menengah dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan. Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip-prinsip efisien, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021.

Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

Dalam Revisi Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja). Jika dalam penyusunan Revisi Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Ir.H.AGUS SANUSI,M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19680817 199203 1 007